

Determinan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bangka Belitung

Julia Maharani Putri¹⁾, Faridah²⁾, Sri Hartaty³⁾

^{1,2,3)}Jurusan, Politeknik Negeri Sriwijaya

^{1,2,3)}juliamhrnprtry@gmail.com ; faridahcute_iryani@yahoo.com ; atik.hasyim@gmail.com

ABSTRACT

Knowing and analyzing how PAD, Balancing Funds, and SiLPA affect capital expenditure in Regencies/Cities in Bangka Belitung Province is the purpose of this study. Researchers used purposive sampling to select 6 out of 7 Regencies/Cities in Bangka Belitung in 2014-2023 to be studied. The data used are Budget Realization Reports in the Regency/City Government Reports in Bangka Belitung Province sourced from the official website djk.kemkeu.go.id. The multiple regression analysis method used in this study is IBM SPSS 26. Balancing funds and SiLPA have a role in forming capital expenditure. Finally, PAD has an impact on capital expenditure.

ABSTRAK

Mengetahui dan menganalisis bagaimana PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA mempengaruhi belanja modal pada Kabupaten. Kota di Provinsi Bangka Belitung adalah tujuan dari penelitian ini. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk memilih 6 dari 7 Kabupaten/Kota di Bangka Belitung di tahun 2014-2023 untuk diteliti. Data yang dipakai berupa Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung yang bersumber dari situs resmi djk.kemkeu.go.id dan bpk.go.id. Metode analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah IBM SPSS 26. Dana perimbangan dan SiLPA memiliki peran dalam membentuk belanja modal. Terakhir PAD memiliki dampak terhadap belanja modal.

Kata kunci : *Belanja Modal, PAD, Dana Perimbangan, SiLPA*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah ialah kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonomi dalam mengelola dan mengatur pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah memiliki wewenang dalam mengurus sumber daya suatu daerah. Otonomi daerah, dipakai dalam mengevaluasi potensi suatu daerah dan mengelola rumah tangga daerah. Pemerintah Daerah diharapkan menemukan opsi sumber pembiayaan yang memungkinkan mandiri dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah, dengan tujuan mengurangi intervensi pemerintah pusat. Hal ini sejalan atas asas keberlanjutan, kebutuhan, dan kemampuan lingkungan hidup pada hal pengelolaan anggaran daerah (Marliana *et al.*, 2022).

Anggaran daerah biasa disebut APBD. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rancangan keuangan daerah tahunan yang disusun sesuai Peraturan Daerah. APBD memuat tiga komponen yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja modal merupakan sebuah subkomponen dari belanja daerah. Belanja modal adalah anggaran yang dianggarkan guna mendapatkan aset tetap dan lainnya yang berguna lebih dari satu periode.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada Tahun 2015-

2019, pemerintah pusat membatasi belanja modal minimal 30% setiap tahun dari jumlah belanja daerah yang dialokasikan dalam APBD. Peneliti memakai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung sebagai objek karena wilayah ini menarik untuk dipelajari dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Tabel berikut menunjukkan realisasi belanja modal pada belanja daerah di seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota di Bangka Belitung tahun 2014-2023.

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014-2023

| TAHUN | Belanja Daerah (Miliar Rupiah) | Belanja Modal (Miliar Rupiah) | % |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| 2014 | 690,08 | 169,87 | 24,99 |
| 2015 | 787,67 | 216,51 | 27,69 |
| 2016 | 918,79 | 242,66 | 26,42 |
| 2017 | 836,75 | 176,96 | 21,02 |
| 2018 | 899,06 | 183,18 | 20,66 |
| 2019 | 985,13 | 197,20 | 20,14 |
| 2020 | 923,18 | 135,09 | 14,79 |
| 2021 | 924,59 | 257,95 | 29,29 |
| 2022 | 990,64 | 153,90 | 15,36 |
| 2023 | 1069,68 | 189,41 | 17,64 |

Sumber: [djk.kemkeu](http://djk.kemkeu.go.id), 2024

Persentase Belanja Modal Provinsi Bangka Belitung di 2014-2023 menggunakan rasio belanja modal secara berturut-turut sebesar 24,99% pada tahun 2014, 27,69% di tahun 2015, 26,42% pada tahun 2016, 21,02% pada tahun 2017, 20,66% di tahun 2018, 20,14% di tahun 2019, 14,79% pada tahun 2020, 29,29% pada tahun 2021, 15,36% pada tahun 2022, dan 17,64% pada tahun 2023. Nilai tersebut berada dibawah 30% dari jumlah belanja APBD. Sehingga, hal ini menjadi perhatian khusus terutama rendahnya belanja modal di Provinsi Bangka Belitung. Jadi,

alokasi belanja modal untuk wilayah tersebut di 2014-2023, masih rendah atau belum optimal.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota Bangka Belitung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mempresentasikan sebuah teori keagenan yang mengklarifikasi dinamika hubungan antara prinsipal (pihak yang memberikan mandat) dan agen (pihak yang menerima mandat). Berdasarkan teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus mempertimbangkan tujuan kesepakatan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Belanja modal, seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, dimaksudkan untuk meningkatkan aset tetap dan memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu periode.

Teori keagenan ini juga dapat diterapkan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat menegaskan bahwa pemerintah memegang amanah untuk mengelola sumber daya daerah dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sebagai bentuk umpan balik kepada masyarakat.

Belanja Modal

Sesuai PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal ialah anggaran untuk mendapatkan aset tetap dan lainnya yang berguna melebihi 1 periode. Belanja modal bermaksud menyajikan fasilitas publik yang mendukung Masyarakat dalam beraktivitas. Aset tetap milik pemda merupakan sebab diadakannya belanja modal yang menjadi sebuah syarat penyelenggaraan pelayanan publik (Harun & Handayani, 2021). Faktor yang mempengaruhi belanja modal, pemda tidak secara eksplisit dijabarkan, tetapi prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip pengelolaan belanja modal, dan aspek-aspek lain yang relevan diatur secara rinci. Berbagai faktor ini kemudian diinterpretasikan dan dijalankan pemerintah daerah sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun faktornya yakni PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA perlu diketahui guna menambah pengalokasian belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kerangka desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuannya.

PAD diartikan pendapatan yang didapatkan berdasarkan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan APBD, belanja modal wajib dialokasikan sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan PAD yang diperoleh agar saat pemerintah daerah mau menambahkan belanja modal pada kesejahteraan Masyarakat dan pelayanan public, pemda hendaknya memupuk sebesar-besarnya PAD (Rahmawatia *et al.*, 2023).

Sumber-sumber PAD dapat diperoleh dari retribusi, pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapat lainnya yang sah. Dengan ini, pemerintah daerah menentukan kesuksesan pengguna tersebut. (Rahmawatia *et al.*, 2023).

Dana Perimbangan

Tujuan utama dana perimbangan ialah guna memenuhi perimbangan supaya potensi dan sumber daya setiap daerah terbagi sesuai, dana juga ditujukan guna membiayai kewenangan daerah yang maksudnya guna mengurangi ketidaksetaraan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan daerah, dan memperkecil kesenjangan pendanaan antar daerah. Dengan ini, pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola pendapatan lokal dan memaksimalkan pemakaian dana perimbangan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Komponen dana ini, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2019 Tentang APBN Tahun Anggaran 2020, SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran seperiode atas realisasi defisit anggaran. Hendaknya SiLPA di tahun sebelumnya nol agar mampu menutup defisit anggaran saat realisasi belanja modal melampaui pendapatan. SiLPA adalah komponen efisiensi, sebab terbentuk atas surplus APBD dan positifnya pembiayaan neto, atau pengeluaran lebih sedikit dari penerimaan. (Simbolon *et al.*, 2020). Dana SiLPA dapat digunakan negara untuk memperluas infrastruktur dalam bentuk belanja modal. Jadi, bertambahnya SiLPA maka bertambah juga belanja modalnya.

3. METODOLOGI

Jenis Penelitian

Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan data silang/cross section sebanyak enam (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung dan time series selama sepuluh (10) tahun yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung.

Objek Penelitian

Peneliti memakai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung sebagai objek penelitian yakni enam (6) Kabupaten/Kota atas data yang bersumber dari situs djpk.kemenkeu.go.id dan bp.go.id.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan semua elemen yang dijasikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah semua subjek yang ditaksir, sebagai unit yang dikaji. (Sugiyono, 2018:136). Populasi penelitian mencakup semua Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung tahun 2014-2023.

Tabel 3.1 Populasi

| No. | Nama Kabupaten/Kota |
|-----|---------------------|
| 1. | Bangka |
| 2. | Belitung |
| 3. | Bangka Tengah |
| 4. | Bangka Selatan |
| 5. | Bangka Barat |
| 6. | Belitung Timur |
| 7. | Kota Pangkal Pinang |

Sumber : DJPK RI dan BPK RI, 2024

Sampel ditentukan melalui teknik *Purposive sampling*. Dengan 60 unit pengamatan yang memenuhi kriteria, mencakup 5 kabupaten dan 1 kota x 10 tahun periode. Sampel dipilih dengan mempertimbangkan suatu acuan yaitu Kabupaten/kota di Bangka Belitung yang memiliki laporan keuangan di 2014-2023.

Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian

| Kelompok | Kriteria |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Populasi | 7 Kabupaten/Kota x 10 Tahun |
| Jumlah Kabupaten/Kota | 7 Kabupaten/Kota |
| Pendapatan Asli Daerah | Terpenuhi |
| Dana Perimbangan | Terpenuhi |
| Sisa Lebih Pembayaan Anggaran | Tidak bernilai negatif dan nol |
| Sampel | 6 Kabupaten/Kota x 10 Tahun |

Sumber: Data diolah, 2024

Dengan melihat kelompok yang disesuaikan, maka diambil beberapa Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kelompok untuk mencukupi data penelitian.

Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Tahun |
|-----|--------------------------|--------------|
| 1. | Kabupaten Bangka | 10 Tahun |
| 2. | Kabupaten Belitung | 10 Tahun |
| 3. | Kabupaten Bangka Tengah | 10 Tahun |
| 4. | Kabupaten Bangka Barat | 10 Tahun |
| 5. | Kabupaten Belitung Timur | 10 Tahun |
| 6. | Kota Pangkal Pinang | 10 Tahun |

Sumber : DJPK RI dan BPK RI, 2024

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ialah mencari data sekunder dan informasi yang sumbernya berkas pemerintah terkait. Data diambil melalui unduhan dari djpk.kemenkeu.go.id dan bpk.ri.go.id untuk memperoleh data PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA tertera di Laporan Realisasi Anggaran 6 Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung sesuai dengan periode pengamatan.

Definisi Operasional Variabel

Belanja Modal (Y)

Belanja modal ialah anggaran untuk mendapatkan aset tetap dan lainnya yang berguna melebihi 1 periode. Belanja modal bermaksud menyajikan fasilitas Pengukuran yang digunakan adalah Belanja Modal = Tanah + Peralatan dan Mesin + Bangunan dan Gedung + Irigasi, Jalan, dan Jaringan + Aset Tetap + Lainnya. Skala yang digunakan adalah rasio

PAD (X1)

PAD diartikan pendapatan yang didapatkan berdasarkan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan. Bertambahnya PAD daerah, dapat menggambarkan kemandirian daerah (Prasetyo & Rusdi, 2021). Pengukuran PAD = Retribusi + Pajak + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + PAD Lainnya yang Sah. Menggunakan skala rasio.

Dana Perimbangan (X2)

Dana perimbangan dana yang asalnya dari APBN yang dialokasikan dalam mencukupi keperluan dalam desentralisasi kepada daerah. Pengukuran yang digunakan adalah DAU + DAK + DBH = Dana Perimbangan. Skala yang digunakan adalah rasio.

SiLPA(X3)

SiLPA merupakan sisa aktualisasi pengeluaran dan pendapatan daerah dalam seperiode. SiLPA

berpengaruh pada belanja modal daerah, saat belanja daerah rendah, SiLPA besar (Marliana *et al.*, 2022.). Pengukuran yang digunakan adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran = Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan. Skala yang digunakan berupa rasio.

Teknik Analisis

Data dianalisis dengan regresi berganda, yang terlebih dahulu dianalisis statistik deskriptif, uji normalitas dan asumsi klasik dengan berbantuan *SPSS for Windows* versi 26.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Variabel

Tabel 4.1 Hasil Uji Deskripsi Variabel

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|----------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| PAD | 60 | 36.94 | 201.97 | 120.2328 | 46.42516 |
| Dana Perimbangan | 60 | 240.57 | 1040.73 | 655.5603 | 166.55111 |
| SiLPA | 60 | 5.77 | 212.16 | 103.7018 | 51.49002 |
| Belanja Modal | 60 | 79.18 | 960.10 | 190.5353 | 113.42355 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Sumber: output spss, 2024

Tabel 4.1 mendeskripsikan variabel dari setiap variabel penelitian. Jumlah 60 sampel Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota yang akan dikaji.

- 1) Variabel Independen PAD (X1) dengan nilai minimum 36.94, nilai maximum 201.97, rata-rata 120.2328, dan standar deviasi 46.42516.
- 2) Variabel Independen Dana Perimbangan (X2) dengan nilai minimum 240.57, nilai maximum 1040.73, rata-rata 655.5603, dan standar deviasi 166.55111.
- 3) Variabel Independen SiLPA (X3) dengan nilai minimum 5.77, nilai maximum 212.16, rata-rata 103.7018, dan standar deviasi 51.49002.
- 4) Variabel dependen Belanja Modal (Y) mempunyai nilai minimum 79.18, nilai maximum 960.10, rata-rata 190.5353, dan standar deviasi 113.42355.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .00699409 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .088 |
| | Positive | .047 |
| | Negative | -.088 |
| Test Statistic | | .088 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: output spss, 2024

Tabel 4.2 menerangkan berdistribusi normalnya data pengujian, dengan signifikansinya 0.200, atau lebih dari 0,05.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas

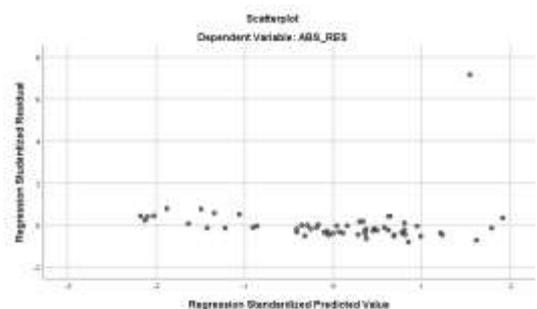
| Model | Coefficients ^a | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|------|-----------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | -5.110 | .297 | -17.177 | .000 | | |
| LnPAD | -1.874 | .100 | -7.785 | .000 | .849 | 1.178 |
| LnDanaPerimbangan | .551 | .039 | 5.12 | .000 | .897 | 1.115 |
| LnSiLPA | 9.353 | .482 | 8.536 | .000 | .788 | 1.270 |

a. Dependent Variable: LnBelanjaModal

Sumber: output spss, 2024

Tabel 4.3 menerangkan tidak terjadi korelasi diantara variabel independent dalam pengujian. Nilai tolerance dari variabel PAD 0,849, variabel dana perimbangan sebesar 0,897, variable SiLPA 0,788, semua variabel menunjukkan nilai *tolerance* $\geq 0,10$. Sedangkan, VIF variable PAD 1.178, variabel dana perimbangan 1.115, variabel sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 1.270, seluruh variabel menjelaskan $VIF \leq 10$. Jadi, tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independent dalam model regresi di pengujian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: output spss, 2024

Gambar 4.1 Scatterplot Heteroskedastisitas

Pada gambar 4.1 di atas menampilkan titik-titik tersebar di atas dan bawah 0 dengan acak di sumbu Y. Menunjukkan pada model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga layak dimanfaatkan dalam memprediksi belanja modal sesuai masukan variabel independen PAD, dana perimbangan, dan SiLPA.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary ^a | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .889 ^a | .878 | .877 | .01550 | 1.484 |

a. Predictors: (Constant), LnSiLPA, LnDanaPerimbangan, LnPAD
b. Dependent Variable: LnBelanjaModal

Sumber: output spss, 2024

- n = 60
- d = 1.484
- dL = 1.4797
- dU = 1.6889
- 4-dL = 4-1.4797 = 2,5203
- 4-dU = 4-1.6889 = 2.3111
- Hasil = dL < d < 4-dU
= 1.4797 < 1.484 < 2.3111

Tabel 4.4 menyatakan DW test 1.864, nilai dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (DW) dengan signifikansi 5%, jumlah sampel 60 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k3), maka didapat nilai dL 1.4797, nilai dU sebesar 1.6889 (lihat lampiran). Maka, dL lebih kecil dari DW dan kurang dari 4-du (1.4797 < 1.484 < 2.3111), jadi tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif (lihat dasar pengambilan keputusan).

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -5.110 | .297 | | -17.177 | .000 |
| | LnPAD | -1.874 | .108 | -.735 | -17.319 | .000 |
| | LnDanaPerimbangan | .551 | .039 | .512 | 14.085 | .000 |
| | LnSiLPA | 9.353 | .402 | 8.536 | 19.414 | .000 |

a. Dependent Variable: LnBelanjaModal

Sumber: output spss, 2024

Tabel 4.5 hasil koefisien regresi dan nilai konstanta, dan terbentuk persamaan:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

$$Y = -5.110 - 1.874X1 + 0.551X2 + 9.353X3 + e$$

Persamaan ini diartikan sebagai:

- 1) Konstanta -5.110, maksudnya ketika variabel PAD, dana perimbangan dan SiLPA 0, maka variabel belanja modal akan bernilai -5.110.
- 2) Koefisien regresi variabel PAD -1.874, maksudnya ketika PAD menurun, maka belanja modal turut menurun 0.229. Hal ini menerangkan antara PAD dengan belanja modal terdapat hubungan negatif.

- 3) Koefisien regresi variabel dana perimbangan 0.552, maksudnya saat dana perimbangan meningkat, belanja modal turut meningkat 0.552. hal ini menerangkan antara dana perimbangan dengan belanja modal terdapat hubungan positif. Meningkatnya dana perimbangan, maka meningkat juga belanja modal.
- 4) Koefisien regresi variabel SiLPA 9.353. Artinya saat SiLPA meningkat, belanja modal turut meningkat 9.353. Hal ini menunjukkan antara SiLPA dengan belanja modal terdapat hubungan positif.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .889 ^a | .878 | .877 | .01550 |

a. Predictors: (Constant), LnSiLPA, LnDanaPerimbangan, LnPAD
b. Dependent Variable: LnBelanjaModal

Sumber: output spss, 2024

Tabel 4.6 menerangkan Adjusted R Square sebesar 0,877 atau 87,7%. Artinya 87,7% variasi belanja modal bisa dijelaskan variasi ketiga variabel independen. Sementara tersisa (100%-87,7%) atau 12,3% dijelaskan berbagai sebab lainnya di luar model.

Uji Statistik F

Tabel 4.7 Hasil dari uji statistik F

| ANOVA ^a | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|---------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F |
| 1 | Regression | .603 | 3 | .201 | 835.936 |
| | Residual | .013 | 56 | .000 | |
| | Total | .616 | 59 | | |

a. Dependent Variable: LnBelanjaModal
b. Predictors: (Constant), LnSiLPA, LnDanaPerimbangan, LnPAD

Sumber: output spss, 2024

Tabel 4.7 menunjukkan F-hitung 835.936 dan signifikansi 0.000. Sehingga F-hitung (835.936 > 3.16) dan signifikansi (0.000 < 0,05), maka variabel PAD, dana perimbangan dan SiLPA mempengaruhi belanja modal dengan simultan.

Uji Statistik t

Tabel 4.8 Hasil dari uji statistik t

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -5.110 | .297 | | -17.177 | .000 |
| | LnPAD | -1.874 | .108 | -.735 | -17.319 | .000 |
| | LnDanaPerimbangan | .551 | .039 | .512 | 14.085 | .000 |
| | LnSiLPA | 9.353 | .402 | 8.536 | 19.414 | .000 |

a. Dependent Variable: LnBelanjaModal

Sumber: output spss, 2024

Tabel 4.8 memaparkan hasil uji statistik t (uji parsial) sebagai berikut.

- 1) Variabel PAD dengan t-hitung -17.319 dan signifikansi 0.000. Menunjukkan t-hitung melampaui t-tabel (-17.319 < 2.00247) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), PAD dinyatakan mempengaruhi belanja modal.

- Jadi, dengan parsial PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.
- 2) Variabel dana perimbangan mempunyai t-hitung 14.085 dan signifikansi 0,000. Sehingga t-hitung melampaui t-tabel ($14.085 > 2.00247$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Jadi, dengan parsial dana perimbangan terhadap belanja modal berpengaruh positif dan signifikan.
 - 3) Variabel SiLPA mempunyai t-hitung 19.414 dan signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($19.414 > 2.00247$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Jadi, dengan parsial SiLPA berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Hasil uji 1 (uji parsial), t-hitung variabel PAD -17.319. T-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-17.319 < 2.00247$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), bisa ditarik kesimpulan dengan parsial PAD signifikan dan berpengaruh negatif terhadap belanja modal. PAD berperan penting atas belanja modal daerah, bertambahnya PAD daerah akan mendorong bertambahnya alokasi belanja modal (Prasetyo & Rusdi, 2021). Berikut merupakan tabel perbandingan nilai belanja modal, PAD, dan dana perimbangan.

Tabel 4.9 Perbandingan Nilai Belanja Modal, PAD, dan Dana Perimbangan (Dalam Miliar Rupiah)

| Kab/Kota | Tahun | Belanja Modal | PAD | Dana Perimbangan |
|---------------------|-------|---------------|--------|------------------|
| Kab. Bangka | 2014 | 161.29 | 89.11 | 681.88 |
| | 2015 | 151.57 | 115.95 | 771.74 |
| | 2016 | 170.44 | 129.06 | 867.2 |
| Kota Pangkal Pinang | 2014 | 212.47 | 113.81 | 501.29 |
| | 2015 | 217.32 | 135.3 | 538.21 |
| | 2016 | 211.15 | 136.26 | 781.81 |
| Kab. Bangka Tengah | 2014 | 173.35 | 61.63 | 484.18 |
| | 2015 | 149.64 | 66.34 | 583.5 |
| | 2016 | 133.63 | 73.46 | 660.12 |
| Kab. Belitung | 2014 | 205.75 | 130.45 | 544.08 |
| | 2015 | 239.57 | 125.79 | 574.52 |
| | 2016 | 172.92 | 138.23 | 675.39 |
| Kab. Belitung Timur | 2014 | 122.03 | 72.69 | 505.71 |
| | 2015 | 79.18 | 74.22 | 547.7 |
| | 2016 | 123.68 | 90.36 | 628.4 |

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 4.9 menunjukkan belanja modal di Kabupaten Bangka sejak 2014 hingga 2016 selalu meningkat, PAD di Kabupaten Bangka tahun 2015 juga meningkat tetapi menurun di tahun 2016, sedangkan dana perimbangan di Kabupaten Bangka yang selalu meningkat sejak tahun 2014-2016 sejalan dengan belanja modal. Belanja modal di Kota Pangkal Pinang meningkat pada tahun 2015 tetapi menurun di tahun 2016, sedangkan PAD di Kota Pangkal Pinang sejak 2014 hingga 2016 selalu mengalami peningkatan begitupun dengan dana perimbangan yang selalu meningkat sejak 2014-2016. Belanjapmodal pada Kabupaten BangkapTengah sejak 2014-2016 selalu mengalami penurunan, tetapi PAD di Kabupaten Bangka Tengah sejak 2014-2016 senantiasa meningkat,

sedangkan dana perimbangan juga mengalami peningkatan sejak tahun 2014-2016. Belanja modal di Kabupaten Belitung pada tahun 2015 mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan di tahun 2016, sedangkan PAD di Kabupaten Belitung sejak tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan, begitupun dengan dana perimbangan yang selalu meningkat sejak tahun 2014-2016. Belanja modal pada Kabupaten Belitung Timur di 2015 menurun dan meningkat di 2016, tetapi PAD pada Kabupaten Belitung Timur sejak tahun 2014-2016 senantiasa meningkat, begitupun dengan dana perimbangan yang selalu meningkat sejak tahun 2014-2016. Berdasarkan LKPD BPK RI, hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan kas dan setara kas belum sesuai ketentuan yang salah satunya disebabkan karena pengelolaan rekening BOS APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung belum memadai.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Darmayanti (2019) yang menunjukan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kenyataan, yakni pengaruhnegatif dan signifikan antara PAD (X1) terhadap Anggaran BelanjapModal (Y). Hal ini terjadi karena nilai PAD berbanding terbalik dengan nilai belanja modal dalam artian jika nilai PAD meningkat, maka nilai belanja modal menurun begitupun sebaliknya. Kontribusi PAD terhadap Belanja Modal tergolong rendah, sebab penerimaan PAD terlalu kecil. Pemerintah daerah juga tidak memaksimalkan pengelolaan dan penggalian potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah (Pramudya & Abdullah, 2021).

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Hasil uji t (uji parsial), t-hitung variabel dana perimbangan adalah 14.085. T-hitung melampaui t-tabel ($14.085 > 2.00247$) dan signifikansi lebih kecil dan 0,05 atau ($0,000 < 0,05$), jadi variabel dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal.

PP No. 5 tahun 2005 menerangkan dana perimbangan ialah dana yang sumbernya dari APBN. Analisis menunjukkan adanya kaitan yang berpengaruh secara signifikan antara Dana perimbangan (X2) terhadap Anggaran Belanja Modal (Y). Dana Perimbangan dan belanja modal senantiasa meningkat setiap tahunnya. Dan memperjelas asumsi pengalokasian Belanja Modal yang baik dengan tidak langsung mendorong kenaikan Dana Perimbangan.

Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja Modal

Hasil uji t (uji parsial), nilai t-hitung untuk variabel sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebesar 19.414. Nilai t-hitung melampaui t-tabel ($19.414 > 2.00247$) dan signifikansi lebih kecil dan 0,05 ($0,000 < 0,05$), jadi dengan parsial SiLPA

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal.

Dengan meningkatnya penerimaan pembiayaan dari SiLPA, pemba berkecukupan biaya untuk pengelolaan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik melalui maksimalnya alokasi dana dalam anggaran belanja modal. SiLPA dari peningkatan kinerja pendapatan dan efisiensi belanja daerah, adalah dana bersih yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Anggaran Belanja Modal dalam mengadakan pelayanan public yang baik.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut.

- 1) PAD berpengaruh Negatif dan signifikan secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal
- 2) Dana Perimbangan berpengaruh Positif dan signifikan secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal
- 3) Seacar parsial, SiLPA berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- 4) PAD, SiLPA, Dana perimbangan dengan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.

5.2. Saran

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung perlu memaksimalkan potensi ekonomi lokal dengan mengoptimalkan sumber daya alam, sektor pariwisata, dan UMKM melalui kebijakan yang mendukung, seperti insentif untuk pelaku usaha lokal. Alokasi Belanja Modal harus difokuskan pada pengembangan infrastruktur publik, seperti jalan, fasilitas transportasi, dan pusat ekonomi, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik investasi. Selain itu, pemanfaatan Dana Perimbangan sebaiknya diarahkan untuk pengembangan fasilitas publik yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi. Pengelolaan SiLPA dengan bijak untuk investasi infrastruktur dan mengurangi belanja hibah serta bantuan sosial yang tidak efektif akan membantu meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Penyederhanaan proses perizinan dan kemitraan dengan sektor swasta serta lembaga keuangan juga penting untuk mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, R. A., & Arifin, J. (2024). Model konseptual rasio keuangan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. *Proceeding Of National Conference On Accounting and Finance*, 6, 120–127.

Ardhani, P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 108– 117.

Ghozali. (2022). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. & Kusufi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Bandung: Salemba Empat.

Harun, M. G., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*,

Himawan, H. S., Mubarak, A., Wahyuni, E., Sari, E. E., & Sukmawati, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Indonesia. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 9–13.

<https://doi.org/10.52300/blnc.v16i1.12544>.

<https://djpk.kemenkeu.go.id>, (Accessed: 24 March 2024).

<https://www.bpk.go.id/> (Accessed: 28 March 2024).

Indriyana Widyastuti, M. I. (2016). Faktor Yang Dapat Menunjang Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Indriyana. 2833, 1–23.

James W, Elston D, T. J. *et al.* (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2020. *Andrew's Disease Of The Skin Clinical Dermatology.*, 12(2), 615–622.

Kadek Sukma Intan Cahyani, Ni Wayan Yuniasih, R. D. A. W. (2023). *e-ISSN 2798-8961 Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Januari 2023*. 2021, 44–56.

Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158. [https://www.e-journal.stie-
aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/781](https://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/781).

Mahsun, Moh, Firman Sulistiyowati, Andre Purwanugraha. (2013). *Akuntansi Sektor Publik, edisi ketiga*. BPFE. Yogyakarta.

Maulida, R. (2023) Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya, Online Pajak. Available at: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah> (Accessed: 31 March 2024).

- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620–640.
<https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>.
- Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: praktik di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art2>
- Pratama, Oktavianto Nugraha. (2024). *Analysis of the influence of good public governance and organizational values on the performance of public sector organizations*. 7, 5116–5138.
- Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal. *Inovasi*, 17(4), 653–660.
<https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10041>
- Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*5,48–75.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/17867>
- Rahmawati, W., Masril, M., & Piliang, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(03), 86–94.
<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.707>
- Rini (2022) Inilah Definisi Dan Contoh Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Rini Isparwati. Available at: <https://riniisparwati.com/lain-lain-pendapatan-daerah/> (Accessed: 31 March 2024).
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839.
<https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>.
- Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows* versi 26. (2024). (Accessed: 20 Juni 2024).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Topan, R. (2023) Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hukum Positif Indonesia. Available at: <https://rendratopan.com/2020/10/16/pendapatan-daerah-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2019-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/#Hasil-Kekayaan-Daerah-yang-Dipisahkan> (Accessed: 31 March 2024).
- Twinki, B. S., & Widiyanti, D. R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Journal Of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 489-504
<https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess/article/view/179/105>.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap peng-alokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1).
- Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *June*, 693–701.
<https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224>.
- _____. (1945). Pasal satu (1) ayat dua (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- _____. (2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 02. Tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan.
- _____. (2009). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- _____. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- _____. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018. Tentang Klasifikasi Anggaran.
- _____. (2019). Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun

2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. (2019). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.